



**BPMP**  
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Provinsi  
Kepulauan Riau

# Melayani ATS/Anak Laut 'Pembelajaran' Bermutu untuk Semua di Kabupaten Lingga

*From Schooling to Learning*

Atria Serpong, 22 September 2025

RAMAH

#PENDIDIKAN  
BERMUTU  
UNTUK SEMUA

## Pemerintah berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu untuk seluruh warga negara Indonesia

### Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 31 ayat 1)

"Setiap warga negara berhak **mendapatkan pendidikan.**"

### UU Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003)

#### Pasal 5

(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh **pendidikan yang bermutu**

#### Pasal 11

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya **pendidikan yang bermutu** bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi

#### Pasal 1

**Standar nasional pendidikan** adalah **kriteria minimal tentang sistem pendidikan** di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menyediakan pengelolaan, proses pembelajaran, dan hasil belajar yang berkualitas

Tersedia di satuan pendidikan

Penyediaan mekanisme untuk memastikan penyelenggaraan sesuai standar mutu



OECD (2023); Indra (2023); Brown dkk (2021); Garira (2020); Stockmann, dkk (2020); Li, dkk (2019); OECD (2013); MacBeath (2010)

# Rasional

Akademik

## Studi Pendidikan dan Kehidupan Masyarakat Suku Laut

*Hak pendidikan bagi anak suku laut di Pulau Kelumu Kab. Lingga belum terpenuhi, selain tidak tersedianya sekolah yang memadai, mereka lebih menikmati menjalani kehidupan di dalam sampan dari pada bersekolah (Tan, 2019)*

*Sebagian anak-anak suku laut usia sekolah yang ada di Pulau Senang, Lingga sudah bersekolah (SD, SMP) namun mayoritas dari mereka putus sekolah bahkan tidak pernah bersekolah karena jarak sekolah jauh dari tempat kediaman dan kebiasaan berkehidupan di laut (Elsera dkk, 2022)*

*Anak-anak dari masyarakat Suku Laut di desa Berakit, Bintan, putus sekolah dan kehilangan motivasi untuk bersekolah, karena mereka tidak biasa meninggalkan laut apalagi mejauh dari kehidupan laut (Saniah, 2022)*

*Masyarakat Suku Laut di Perkampungan Air Ingat Desa Baran Kec. Bakung Serumpun, Lingga, memandang sekolah bukanlah suatu tempat yang menjanjikan dan menjamin kehidupan anak-anak mereka ke depan, daripada bertahan hidup di laut (Pratama, 2024)*

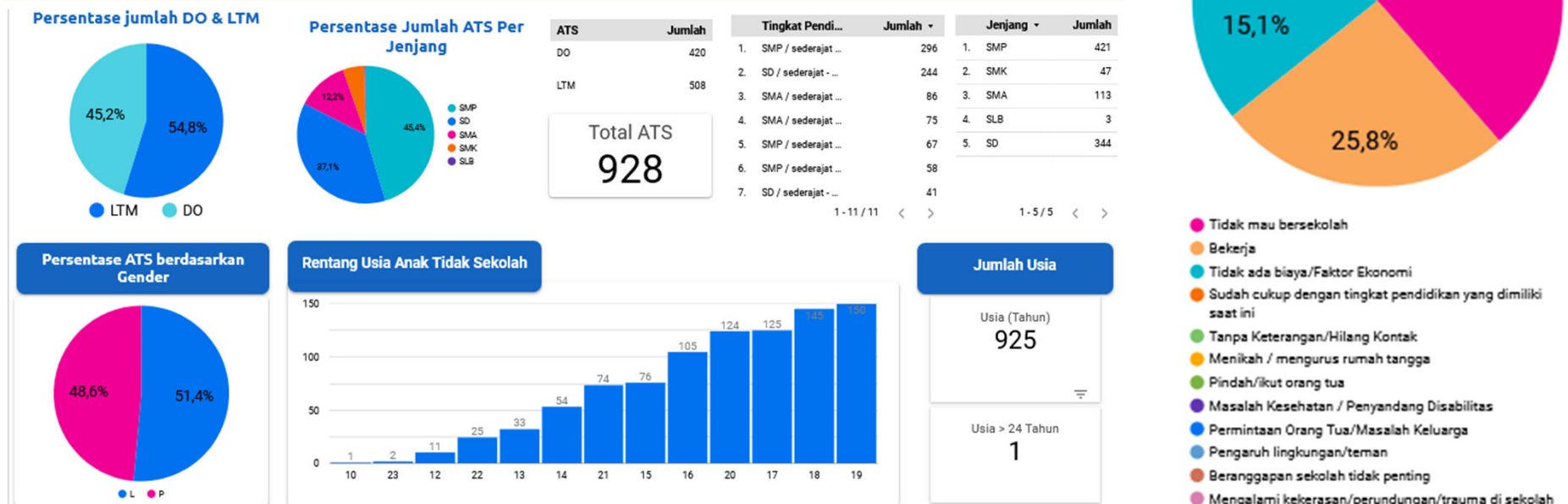
*Rendahnya partisipasi pendidikan anak suku laut dan tingginya angka anak tidak sekolah salah satunya disebabkan tidak adanya program pemerintah dan pemda untuk melayani dengan serius pemenuhan hak pendidikan mereka (Nayangsari, dkk, 2022)*

Suku laut (*Sea Nomads*) adalah salah satu masyarakat adat suku bangsa Melayu tua yang hidup berpindah pindah dengan menggunakan sampan mendiami wilayah perairan Kepulauan Riau

# Rasional

Data dan Informasi

## Data Anak Tidak Sekolah (ATS) Kab. Lingga



Dari 928 anak tidak sekolah di Lingga, sebanyak 421 atau 45,4% adalah anak di usia SMP. Mayoritas anak tidak sekolah disebabkan mereka tidak mau bersekolah, sebesar 358 atau 38,6%

Data hasil verval Disdikpora  
Lingga dan BPMP (18/9)

Sumber: Rekapitulasi Analisis Data Anak Tidak Sekolah Kepulauan Riau (RADAR) BPMP Prov. Kepulauan Riau, 22 September 2025



# Dukungan Pemda Lingga

Informasi Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga

## Dukungan Pemkab Lingga Terhadap Wajar 13 Tahun & Penanganan ATS

### Dukungan Pemerintah Daerah Lingga

1. SK Bupati Lingga No. 191/KPTS/IV/2025 tentang Perubahan 10 Paket Strategis.
2. Kemitraan SKB Lingga & Lapas Dabo Singkep untuk Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C.
3. Bantuan seragam gratis untuk siswa SD dan SMP.
4. Bantuan 10 unit transportasi laut untuk siswa di pulau.
5. Bantuan sepatu dan lunchbox untuk anak PAUD.
6. Penyelenggaraan program pendidikan afirmasi (kelas jauh) untuk jenjang SD dan SMP

### Dukungan OPD Lain

Pemangku kepentingan: Dinas Sosial, Bappeda, DPMD, Kemenag, Disdukcapil.

Kendala: utusan OPD sering berganti sehingga informasi terputus.

Komitmen dukungan lintas OPD:

- Disdukcapil → Pemadanan data kependudukan.
- DPMD → Dorong desa lakukan verval ATS.
- Kemenag → Dukungan di madrasah.
- Bappeda → Mengawal perencanaan daerah



[ecology.or.id/en/seanomadsindigenoustriauarchipelago](https://ecology.or.id/en/seanomadsindigenoustriauarchipelago)

### Strategi Implementasi Peningkatan Mutu Pendidikan secara Bergotong Royong

**Strategi Penanganan Pendidikan Anak Suku Laut Kab. Lingga**

**Fakta**

- anak tidak mau bersekolah
- menyukai bekerja
- tidak ada biaya
- puas dengan pendidikan terakhir
- hilang kontak
- menikah
- trauma perundungan

**Intervensi**

- pemetaan anak
- visit ke lokasi tinggal
- pendekatan ke ortu
- layanan SPMB
- layanan belajar
- layanan psikososial

**Proses**

**Input** → **Proses** → **Output** → **Outcome**

**Pendidikan Bermutu untuk Semua**

- Revitalisasi
- Digitalisasi
- SPMB
- Wajar 13 Tahun
- Karakter
- MBG
- Pembelajaran
- PMP

## Pendidikan Layanan Khusus

Diadaptasi dari skema pengembangan PSKP, 2017

The background of the slide features a group of young children in school uniforms gathered around a laptop. The image is overlaid with a blue tint and digital graphics, including a large circular gauge-like pattern in the upper left and a network of connected dots and lines in the lower right.

Terima kasih

RAMAH

#PENDIDIKAN  
BERMUTU  
UNTUK SEMUA



## Rakor tindak lanjut Program Wajib Belajar 13 Tahun dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)

BPMP Kepri Dorong Kolaborasi Atasi Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Lingga

Selas, 23 September 2025



#PENDIDIKAN  
BERMUTU  
UNTUK SEMUA

RAMAH

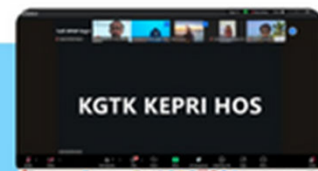
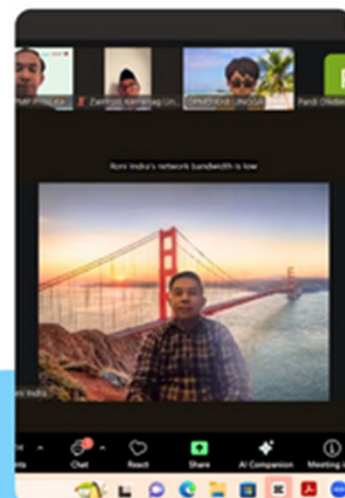
bmpkepri.kemendikdasmen.go.id  
BPMP Kepri

BerAKHLAK

#bangga  
meliputan  
bangsa

#BPMPKEPRI  
wujudkan  
Zi WBK

## RAKOR TINDAK LANJUT WAJIB 13 TAHUN DAN ATS KABUPATEN LINGGA



Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kepulauan Riau bersama Pemerintah Kabupaten Lingga menggelar rapat koordinasi tindak lanjut Program Wajib Belajar 13 Tahun dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada Selasa (23/9/2025) secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pendampingan yang sebelumnya telah dilaksanakan pada 18 September 2025 di Kantor Bupati Lingga. Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Lingga Mokhtaraldi menyampaikan bahwa hingga kini telah dibuat 19 akun desa dari 4 kecamatan untuk memverifikasi data ATS. Dalam dua minggu terakhir, tim akan mendeteksi alasan utama anak tidak bersekolah, mulai dari pindah ke luar negeri, kondisi disabilitas, hingga faktor geografis.

bmpkepri.kemendikdasmen.go.id  
BPMP Kepri

BerAKHLAK

#bangga  
meliputan  
bangsa

#BPMPKEPRI  
wujudkan  
Zi WBK